Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah

(Studi pada SKPD Kabupaten Berau**)**

Rusdiah Iskandar

Salmah Pattisahussiwa

Musviyanti

Muntaqim Fardani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Mulawarman

**Abstract**

*The purpose of the study is to analyze the influence of regional financial accounting system, internal control and organizational commitment to financial accountability of local government. The population are all Regional Work Unit (SKPD) of Berau Regency*. The sampling method using purposive sampling, the type of research is quantitative with primary data types. Methods of data collection using a questionnaire. The data were processed using Smart PLS, which is used to test the hypothesis of research. *These results indicate that regional financial accounting systems and organizational commitment, have positive significantly influence the financial accountability of local government, while internal control have positive effect but not significantly influence the financial accountability of local government. Positive effect means that with the expected improvement on internal control system, it can influence the financial accountability of local government.*

 Keywords: Regional Financial Accounting Systems, Internal Control, Organizational Commitment, financial accountability

**1. Pendahuluan**

Otonomi daerah merupakan pembagian kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya. Perubahan sistem pemerintahan dari sistem terpusat menjadi sistem otonomi daerah berdampak pada perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan ruang lingkup kinerja. Hal ini memberi dampak pada pengaturan sistem keuangan pemerintahan daerah. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* (Darise, 2008: 2). Implikasi penerapan otonomi daerah.dapat dicapai dengan adanya *Good Governance* di lingkungan pemerintahan dengan mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatanpelayanan publik (Halim, 2007 : 59).

 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban/akuntabilitas pelaksanaan APBD, setiap entitas pemerintahan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2009:11) bahwa salah satu bentuk akuntabilitas adalah akuntabilitas finansial yaitu mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

 Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah merupakan pilar dari penerapan *Good Public Governance.* Hal ini merupakan amanat dari UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan proses pengelolaan keuangan daerah memerlukan laporan keuangan yang handal dan dipercaya agar dapat menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut, dengan analisis pengelolaan sumber daya keuangan daerah itu sendiri. Menurut Oesi (2013:15) pengelolaan keuangan adalah pelaksanaan yang meliputi penyusunan, penetapan, pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Oleh karena itu setiap daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang ditujukan bagi *stakeholder.*

LKPD diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dalam penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu: DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, Pemerintah Pusat, dan masyarakat. LKPD meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Neraca Daerah, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan nota perhitungan merupakan kewajiban yang tidak bisa ditunda-tunda karena hal tersebut merupakan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut tentunya akan membawa konsekuensi penolakan oleh DPRD, yang akan menimbulkan dampak politis terhadap pemecatan Kepala Daerah karena dianggap telah melanggar ketentuan hukum yang ada (Bastari, 2004).

Lembaga yang memiliki kewenangan untuk menilai suatu LKPD adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penilaian tersebut, terdapat empat opini hasil penilaian yang dapat diberikan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) suatu instansi pemerintah, yaitu:pertama*,* Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berarti semua LK dinilai wajar sepenuhnya. Kedua*,* Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu terdapat pos-pos yang tertentu saja yang dinilai tidak wajar. Ketiga*,* disclaimer yang diberikan karena terdapat keadaan ketidakpastian (uncertainty). Keempat*,* adversed dikeluarkan   karena LK yang tidak wajar, baik karena ketidakpatuhan terhadap peraturan, tidak sesuai dengan standar akuntansi maupun angka-angka dalam laporan yang menyesatkan. BPK mengharapkan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui birokrasi yang akuntabel menuju pemerintahan yang bersih ( BPK, 2016).

Opini WTP dari BPK atas LK K/L/Pemda Tahun 2006 – 2014 menunjukkan peningkatan kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan. Berdasarkan opini WTP BPK, terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kenaikan opini WTP, atau kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan negara, paling baik terjadi di tingkat K/L kemudian di tingkat pemerintah provinsi dan terakhir di tingkat pemerintah kabupaten/kota ([www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)).

Akuntabilitas dapat diwujudkan melalui laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan haruslah bersifat andal agar dapat dipercaya oleh penggunanya dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Berau terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP Kab. Berau, 2016) untuk memberikan informasi yang akuntabel dan transparan dalam pertanggungjawaban dana yang telah digunakan dan untuk memastikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Berau kepada publik telah dicapai. Adapun Perkembangan opini BPK atas laporan keuangan Kabupaten Berau sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Opini BPK terhadap LKPD Pemda Berau tahun 2006 s.d 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tahun**  | **Opini BPK** |
| 2006 | *TMP* |
| 2007 | *TW* |
| 2008 | *TW* |
| 2009 | *WDP* |
| 2010 | *WDP* |
| 2011 | *WDP* |
| 2012 | *WDP* |
| 2013 | *WDP* |
| 2014 | *WTP* |
| 2015 | *WTP* |
| 2016 | *WDP* |
| 2017 | *WTP* |
| Keterangan:TMP : Tidak Menyatakan PendapatTW : Tidak WajarWDP : Wajar Dengan Pengecualian WTP : Wajar Tanpa Pengecualian |

 Sumber: BPK dan Inspektorat Kabupaten Berau

Pada tahun 2014, BPK memberikan opini terhadap LKPD Kabupaten Berau yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Opini WTP diperoleh pemerintah Kabupaten Berau selama 2 tahun, tahun 2014 dan 2015. Pada tahun 2016 LKPD Kabupaten Berau mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Ditinjau dari perspektif akuntabilitas finansial/keuangan, pemerintah daerah Kabupaten Berau mengalami penurunan akuntabilitas keuangan atas pengelolaan keuangan daerah. Namun pada tahun 2017, opini yang diberikan BPK atas LKPD meningkat kembali menjadi WTP.

 Penilaian yang diberikan BPK atas laporan keuangan Pemda Berau menunjukkan capaian kinerja pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Berau. Setiap pemda berharap akan mendapatan opini Wajar Tanpa Pegecualian (WTP) karena akan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai agen pengelola dana masyarakat dalam memberikan pelayanan. Diharapkan tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya, pemda tidak mendapat opini dengan level yang lebih rendah, yaitu WDP, *disclaimer*, dan *adversed* dari BPK atas LKPDnya. Untuk itu pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangannya sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas finansial dari pelaporan keuangannya. Dengan memperhatikan faktor apa saja yang dapat mempertahankan pencapaian opini WTP.

 Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah yang harus disampaikan tepat waktu, dan disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah, diperlukan sistem yang mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran, dan pengungkapan seluruh transaksi keuangan yang disebut dengan sistem akuntansi (Tuasikal, 2009).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa tingkat keandalan Laporan Keuangan berhubungan erat dengan keandalan sistem akuntansi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Mahmudi (2010:19) mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh seberapa andal sistem akuntansi yang diterapkan. Hal tersebut akan memperlihatkan bagaimana cara pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Salah satu hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi adalah sistem akuntansi.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah menurut Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah (2000: 11) salah satunya adalah akuntabilitas yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

Mulyadi (2010: 19) bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi diantaranya adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru dan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Hidayat (2015) menemukan bahwa sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai. Selain itu beberapa penelitian yang menemukan hasil yang sama bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah Sujono dan Firdaus (2017); Faizun (2017); Albugis (2016); Pasya (2016), Anggraini, dkk (2016); Anandita (2015); Soleha (2014); dan Kurnia (2013).

Halim (2013:258) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas dibutuhkan adanya system pengendalian internal. pengendalian internal akan menjadi faktor yang memperkuat peningkatan kinerja SKPD yang telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem pengendalian internal yang lemah menyebabkan laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan (Mardiasmo, 2004: 34).

Adanya pengawasan intern, dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sistem Pengendalian internal Pemerintah melalui pelaksanaan sistem pengendalian internal yang baik, maka pertanggungjawaban dapat terwujud (Ramon, 2014). Sehingga penerapan sistem pengendalian dapat mendorong peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah.

Lemahnya transparansi dan akuntabilitas tentunya dapat membuka lebar peluang terjadinya manipulasi data yang berujung pada kecurangan. Salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan yang merupakan unsur utama perbuatan korupsi ini adalah dengan meningkatkan dan membangun pengendalian internal yang baik dan menyeluruh. Pengendalian internal merupakan upaya yang dilakukan mencakup unsur-unsur pengendalian internal: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan dari kegiatan dapat dicapai secara efektif, efisien, dipercayanya informasi dan data, serta ditaatinya peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan menerapkan pengendalain intern secara baik dan efektif pada suatu pemerintahan, maka akan meningkatkan kualitas akuntabilitas publik (Ramon, 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2017); Santoso (2016) dan Ramon (2014); menemukan bahwa pengendalian internal bepengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Masyur dkk (2015) menemukan bahwa pengendalian internal bepengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Jika kualitas laporan keuangan semakin baik maka akan semakin meningkatkan akuntabilitas finansial pemda. Penelitian Widyaningsih dkk (2011) menemukan pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas akuntabilitas keuangan pemda.

 Komitmen organisasi merupakan sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan bagaimana seorang anggota organisasi mengekspresikan perhatian mereka kepada kesuksesan dan kebaikan organisasinya. Dengan adanya komitmen yang tinggi maka akan berpengaruh pada kinerja. Jika kinerja pegawai pemerintah baik, maka pengelolaan keuangan dalam organisasi juga akan meningkat. Seseorang dengan memiliki komitmen di organisasi pemerintah dapat diharapkan memiliki pandangan yang positif serta berusaha berbuat yang terbaik untuk mencapai tujuan dan kinerja yang lebih baik lagi. Individu berkomitmen terhadap sasaran artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran atau berusaha menghasilkan tingkat kerja yang lebih tinggi. Komitmen mencakup juga keterlibatan kerja (Halim,2012). Hal ini disebabkan karena antara keterlibatan kerja dengan komitmen organisasi sangat erat hubungannya. Keterlibatan kerja sebagai derajat kemauan untuk menyatukan dirinya dengan pekerjaan, menginvestasikan waktu, kemampuan dan energinya untuk pekerjaan, dan menganggap pekerjaannya sebagai bagian utama dari kehidupannya.

 Andarini (2015); Halim (2012) dalam Dewi, dkk (2017); Harahap (2014); dan Baihaqi (2012) menemukan bahwa komitmen organisasi dapat meningkatkan pengelolaan keuangan yang akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas fianansial pemerintah daerah. Menurut temuan Andarini (2015) Komitmen organisasional berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan juga terhadap akuntabilitas kinerja instansi di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Namun penelitian Listiyana (2015) menemukan bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan.Sehingga tidak akan meningkatkan akuntabilitas keuangan pemda.

Berdasarkan fenomena adanya penurunan opini BPK atas LKPD Pemda Berau dan banyaknya penelitian terdahulu yang menemukan adanya pengaruh dari beberapa faktor terhadap pengelolaan keuangan dan akuntabilitas finansial pemerintah daerah maka yang menjadi motivasi penelitian ini adalah menemukan sumbangsih pemikiran yang dapat digunakan dalam meningkatkan akuntabilitas finansial pemda yang akan berdampak pada regulasi yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya.

Oleh karena itu penting dianalisis pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal dan komitmen organisasi terhadap akuntansi finansial pemda Berau. Sehingga dapat digunakan dalam peningkatan akuntabilitas finansial dalam pengelolaan keuangan daerah ,yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang berasal dari publik.

**2. Landasan Teori**

**2.1 Teori Stewardship**

Teori *Stewardship* menurut Donaldson dan Davis (1991) dalam penelitian Madison (2014) adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai tujuan organisasinya. Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan dan non profit lainnya, yang sejak awal perkembangannya, akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principal.* Berdasarkan teori ini kedua kelompok yaitu *principal* dan *steward* bekerja bersama-sama guna meningkatkan kesejahteraan sesuai keinginan mereka. Hal ini sejalan dengan pengelolaan keuangan, bahwa pencapaian pengelolaan keuangan yang tinggi akan memberikan kepuasan bagi individu sehingga individu tersebut dapat termotivasi untuk selalu berusaha mencapai kinerja yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya.

**2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan pemerintah menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Laporan tersebut tentu melalui sebuah proses yang tidak sederhana. Proses dari penyediaan input akuntansi yang baik dan benar, proses pencatatan, hingga pelaporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan memerlukan sebuah sistem dan prosedur. Menurut Halim (2013:40) akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal dan internal entitas pemerintah daerah (Kabupaten, Kota, atau Provinsi) yang memerlukan. Sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak didalam dan diluar organisasi dari suatu entitas pemerintah daerah. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak-pihak diluar organisasi telah diatur dalam Standar Akuntansi PP No.71 tahun 2010 maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi.

 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa Sistem akuntansi pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Oleh karena itu, sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah daerah. Sedangkan definisi akuntansi keuangan daerah menurut peraturan yang lama (Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) yaitu sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.

Menurut Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 ayat (3) mengatakan bahwa “sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

 Sistem Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

 Menurut Hariyanto (2007:10) Sistem akuntansi keuangan daerah yaitu serangkaian secara sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Menurut Bastian (2006:87) Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah metode pengolahan data dokumen dan catatan, pemahaman sistem akuntansi diperoleh dengan menelaah manual akuntansi dan diagram alur sistem.

**2.3 Pengendalian Internal**

Aktivitas pengendalian Mardiasmo (2009:40) menjelaskan, aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efesien dan efektif, menyajikan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah, ketaatan/kepatuhan terhadap undangundang, kebijakan dan peraturan lain untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Didalam menjalankan pemerintahan, pemerintah dituntut untuk lebih akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut maka pelaksana roda pemerintahan diharapkan lebih terbuka dan berhati-hati dalam menggunakan anggaran atau kekayaan daerah untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas pengendalian yang nantinya dibuat menjadi laporan hasil evaluasi dari aktivitas pengendalian dan seterusnya mengkomunikasikan kejadian yang relevan, handal, dan tepat waktu.

 Moeller (2007) dalam Santoso (2016) menuliskan *pengertian internal control* menurut COSO *(the committe of sponsoring of organizations of the treadway commissions): “Internal control is aprocess, affected by an entity's board of directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance monitoring regarding the achievement of objectives in the following categories: - effectiveness and efficiency of operations, - reliability of financial reporting, - compliance with applicable laws and regulations”*.

 Menurut COSO terdapat lima komponen sistem pengendalian internal yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian *(control environment)*

b. Penilaian/Penentuan Resiko *(risk assessment)*

 c. Aktivitas Pengendalian *(control activities)*

 d. Informasi dan Komunikasi *(information and communication)*

e. Pemantauan *(monitoring)*

 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian internal Pemerintah menyebutkan bahwa, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

**2.4 Komitmen Organisasi**

Robbins dan judge (2007:22) mendefinisikan komitmen sebagai suatu keadaan dimana seorang individu memihak organisasi serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Lubis (2010:35) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh apa seorang karyawan memihak pada organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta berniat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut.

 Lubis (2010:40) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi terbangun apabila setiap individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi atau profesi:

1. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
2. Keterlibatan (*involvment*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
3. Loyalitas (*loyality*), yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

**2.5 Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah**

 Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban/akuntabilitas pelaksanaan APBD, setiap entitas pemerintahan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Akuntabilitas menunjukkan adanya kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan.

 Menurut Mardiasmo (2009:20) bahwa akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah *(agent)* untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah *(principal)* yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. salah satu dimensi akuntabilitas adalah akuntabilita finansial yaitu mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

 PP 105 tahun 2000 dan PP 108 tahun 2000 telah menyatakan mengenai penyusunan APBD berdasarkan kinerja dan pertanggungjawaban APBD untuk penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur renstra. Demikian pula inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mencerminkan adanya kemauan politik pemerintah untuk segera memperbaiki infrastruktur sehingga dapat diciptakan pemerintah yang baik. Menurut LAN dan BPKP (2000) Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

 Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang seperti dikutip Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Santoso (2016) membedakan akuntabilitas dalam tiga macam akuntabilitas. Salah satuya adalah Akuntabilitas Keuangan. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah. Komponen pembentuk akuntabilitas keuangan terdiri atas :

1.Integritas Keuangan.

2. Pengungkapan.

3.Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. *Governmental Accounting Standards Board (1999) dalam Concepts Statement* Nomor 1 Tentang *Objectives of Financial Reporting* dalam Santoso (2016) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Dasar dan bentuk pelaporan keuangan pemerintahan di negara kesatuan Republik Indonesian diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**2.6 Kerangka Konsep dan Model Penelitian**

Akuntabilitas fiansial merupakan hal yang sangat penting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dalam pengelolaan keuangan.. Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas finansial adalah sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal dan komitmen organisasi. Dengan adanya sistem akuntansi maka informasi dari sebuah organisasi tersedia dan dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang digunakan dalam pengambilan keputusan baik pihak eksternal dan internal. Munurut Mulyadi (2010:19), bahwa tujuan umum pengembangan sistem akuntansi diantaranya adalah untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan dan untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian, maupun struktur informasinya. Sedangkan, karyawan yang memiliki komitmen organisasi memiliki potensi untuk memperbaiki kinerja baik secara individual, kelompok maupun organisasi dan karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan memberikan usaha yang maksimal secara sukarela untuk kemajuan organisasi.

 Dalam mengelola keuangan daerah yang baik dibutuhkan sistem akuntansi yang mengatur keuangan daerah agar meningkatkan akuntabilitas finansial. Sehingga sistem akuntansi yang telah diterapkan akan berjalan dengan baik jika sistem pengendalian internal berjalan dengan baik pula. Risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan dalam mepertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

 Pada pemerintah dalam mengelola keuangan daerah memungkinkan tercapainya mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif dengan menunjukkan kinerja manajerial yang baik pula. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan peran pengelolaan keuangan daerah, komitmen organisasi dan sistem akuntansi keuangan daerah.

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal, dan komitmen organsiasi terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas finansial.

Model dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Akuntabilitas Finansial

Pemerintah Daerah

(Y)

Komitmen Organisasi (X3)

Pengendalian internal(X2)

**Gambar 2.1 Model Penelitian**

**3. Pengembangan Hipotesis**

**3.1 Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah**

 Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem pembagian kekuasaan dalam organisasi Pemda melalui pemrosesan data keuangan, mulai dari catatan akuntansi sampai dengan penyajian informasi dalam laporan keuangan (Widyaningsih, 2011). Sistem akuntansi keuangan daerah mencakup suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan data yang berkaitan dengan keuangan dari suatu entitas sehingga dapat memahami informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi.

 Sistem akuntansi keuangan daerah berdasarkan PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai substansi usaha-usaha untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dan transparansi melalui pembangunan sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintah dapat membuat pusat-pusat pertanggungjawaban pada pemerintahan mampu membuat dan menyiapkan laporan keuangan yang cepat, akurat dan lengkap yang memenuhi akuntabilitas sebagaimana yang diamanahkan. Akuntabilitas akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baru sesuai dengan paradigma *good governance*.

 Sistem akuntansi keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan pemerintah dan kinerjanya. Hal ini dikarenakan penerapakan sistem akuntansi pemerintah dapat membuat pusat-pusat pertanggung jawaban pada pemerintahan mampu membuat dan menyiapkan laporan keuangan yang cepat, akurat dan lengkap yang memenuhi akuntabilitas sebagaimana yang diamanahkan.

 Widyaningsin dkk. (2011) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah akan meningkatkan kualitas akuntabilitas. Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka meningkatkan akuntabilitas finansial. Selain itu beberapa penelitian yang menemukan hasil yang sama bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah Sujono dan Firdaus (2017); Faizun (2017); Albugis (2016); Pasya (2016); Anggaraini dkk. (2016); Anandita (2015); Soleha (2014); dan Kurnia (2013).

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis 1:** Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah.

**3.2 Pengaruh Pengendalian internal terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah**

Berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2005 bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Halim (2004) dalam Santoso (2014) menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas, dibutuhkan adanya sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga ada pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dengan akuntabilitas finansial pemerintah daerah. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk. (2017) dan Ramon (2014).

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis 2:** Pengendalian Internal Berpengaruh Positif Siginifikan terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah.

**3.3 Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah**

 Kinerja pegawai pemerintah jika dinilai baik, maka pengelolaan keuangan dalam organisasi juga akan meningkat. Sehingga adanya komitmen yang tinggi maka akan berpengaruh pada kinerja. Seseorang yang memiliki komitmen di organisasi pemerintah dapat diharapkan memiliki pandangan yang positif serta berusaha berbuat yang terbaik untuk mencapai tujuan dan kinerja yang lebih baik lagi. Individu berkomitmen terhadap sasaran artinya bertekad untuk tidak menurunkan/meninggalkan sasaran atau berusaha menghasilkan tingkat kerja yang lebih tinggi. Peningkatan komitmen organisasi merupakan upaya dalam membangun akuntabilitas agar dapat terwujud sehingga meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

 Penelitian yang dilakukan Indrayani, dkk (2017) menemukan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja SKPD. Sejalan dengan penelitian Halim (2012) menemukan bahwa komitmen organisasi akan meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi publik terkait dengan akuntabilitas finansialnya. Dan hasil penelitian oleh Kouzes dalam Kurniawan dan Prastiwi (2013), menunjukkan bahwa kredibilitas yang tinggi mampu menghasilkan suatu komitmen, dan hanya dengan komitmen yang tinggi, suatu instansi pemerintahan mampu menghasilkan kinerja yang baik. Jadi antara komitmen organisasi dengan kinerja terdapat pengaruh yang positif dimana kinerja yang baik pastinya dilatar belakangi oleh komitmen yang kuat. Komitmen organisasi yang buruk tidak menghasilkan kinerja yang tinggi. Jadi, semakin tinggi derajat komitmen organisasi semakin tinggi pula kinerja yang dicapainya. Oleh karena itu koitmen organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas finansial pemerintah daerah terkait dalam mempertangungjawabkan pengelolaan keuangannya dalam bentuk lapoan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi dan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan sebelumnya maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Hipotesis 3:** Komitmen Organisasi Berpengaruh Positif Signifikan terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah.

**4. Metode Penelitian**

* 1. **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**
1. **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah**

 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah rangkaian sistematik dari prosedur penyelenggara untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Menurut Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan anggarannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Sehingga sistem akuntansi keuangan daerah meliputi: pencatatan,penggolongan dan pengikhtisaran serta pelaporan.

Jumlah indikator variabel ada 5 item, pengukuran indikator variabel menggunakan skala likert menurut Djaali (2008:28) menggunakan skor 1-5 (5 = Sangat Setuju (SS), 4 = Setuju (S), 3 = Cukup Setuju (CS), 2 = Tidak Setuju (TS), 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)).

 Indikator untuk mengukur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian Nurliilah (2014) dan Hidayat (2015) adalah sebagai berikut:

1. Pengidentifikasian transaksi
2. Pencatatan transaksi
3. Pencatatan kronologis
4. Pengklasifikasian transaksi
5. Pelaporan yang konsisten dan periodik.
6. **Pengendalian internal**

Pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Indikator untuk mengukur pengendalian internal, menggunakan indikator dalam penelitian Susanto (2016), menurut PP No.60 Tahun 2008, memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat
2. terselenggaranya penilaian risiko;
3. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
4. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi;
5. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian.
6. **Komitmen Organisasi**

 Komitmen organisasi merupakan suatu keadaan dimana pegawai memihak dan peduli kepada organisasi dan tujuan organisasi serta suatu kondisi dimana loyalitas karyawan dibuktikan dengan berusaha tetap bertahan bersama organisasi yang ditempatinya.

 Jumlah indikator variabel ada 5 item, pengukuran indikator variabel menggunakan skala likert menurut Djaali (2008:28) menggunakan skor 1-5 (5 = Sangat Setuju (SS), 4 = Setuju (S), 3 = Cukup Setuju (CS), 2 = Tidak Setuju (TS), 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)).

 Adapun indikator komitmen orgaanisasi yang digunakan Winanti (2014) dalam penelitiannya yaitu:

1. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
2. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
3. Loyalitas (*loyality*)*,* yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.
4. **Akuntabilitas Finansial**

 Akuntabilitas finansial pemerintah daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh pemerintahan daerah mengenai integritas keuangan daerah dalam menyajikan/mengungkapkan laporan keuangan, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan stakeholder/pemangku kepentingan. Susanto (2016) mengungkapkan bahwa sasaran pertanggungjawaban pemda adalah laporan keuangan daerah yang disajikan.

 Jumlah indikator variabel ada 5 item, pengukuran indikator variabel menggunakan skala likert menurut Djaali (2008:28) menggunakan skor 1-5 (5 = Sangat Setuju (SS), 4 = Setuju (S), 3 = Cukup Setuju (CS), 2 = Tidak Setuju (TS), 1 = Sangat Tidak Setuju (STS).

 Adapun indikator akuntabilitas finansial dimodifikasi dari indikator yang digunakan Santoso (2016) yaitu:

1. Pengungkapan
2. Integritas
3. Ketaatan pada peraturan

**4.2 Populasi dan Sampel**

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten Berau yaitu sebanyak 46 SKPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive Sampling*. Penelitian ini hanya difokuskan pada SKPD yang lokasi kantornya tidak jauh dari lokasi pusat pemerintahan Kabupaten Berau. Sampel Penelitian adalah pegawai yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan dan terlibat langsung secara teknis terhadap akuntabilitas finansial pemerintah daerah yang terdapat pada 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Berau. Adapun kriteria responden dalam pengambilan sampel adalah:

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SKPD.
2. Pejabat penatusahaan keuangan (PPK) SKPD.
3. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Pengeluran.
4. Staf Verifikasi Keuangan.
5. Berstatus PNS.

**4.3 Jenis dan Sumber Data**

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan yang terstruktur dalam bentuk kuesioner dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari para responden.

**4.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dengan cara menyebarkan kuesioner.

**4.5 Metode Analisis Data**

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). *Partial Least Square* merupakan metode analisisis yang *powerfull* karena tidak didasarkan banyak asumsi, ukuran sampel yang digunakan tidak harus berdistribusi normal *multivariate* (indikator dengan skala kategori, ordinal, interval, sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama). PLS dapat digunakan untuk mengkonfirmasi teori dan menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antar variabel laten. Oleh karena lebih menitikberatkan pada data dan dengan prosedur estimasi yang terbatas, maka mispesifikasi model tidak begitu berpengaruh terhadap estimasi parameter.

**5. Hasil dan Diskusi**

1. Uji Outer Model

Outer model diinterpretasikan dengan melihat beberapa hal, antara lain: nilai konvergen (*konvergent validity*), nilai diskriminan (*discriminant validity*), *composite reliability*, *Average Variance Extracted* (AVE) dan *alpha cronbach’s*. Model *PLS Algorithm* disajikan pada gambar di bawah ini.



**Gambar 5.1. Model PLS Algorithm**

1. Konvergen validitas

Nilai konvergen yaitu mengukur besarnya *Loading Factor* untuk masing-masing variabel laten. *Loading factor* diatas 0,70 sangat direkomendasikan, namun demikian *Loading Factor* diatas 0,60 masih dapat ditolerir sepanjang model masih dalam tahap pengembangan. Hasil nilai loading indikator selengkapnya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 5.2 Nilai Loading Indikator**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Akuntabilitas Finansial (Y)** | **Komit. Organisasi (X3)** | **Pengendalian Internal (X2)** | **Sis. Akt.Keu.Daerah (X1)** |
| **X1.1** |   |   |   | 0,749513 |
| **X1.2** |   |   |   | 0,853708 |
| **X1.3** |   |   |   | 0,783127 |
| **X1.4** |   |   |   | 0,821623 |
| **X2.1** |   |   | 0,865407 |   |
| **X2.2** |   |   | 0,827456 |   |
| **X2.3** |   |   | 0,793212 |   |
| **X2.4** |   |   | 0,826207 |   |
| **X2.5** |   |   | 0,819402 |   |
| **X3.1** |   | 0,876282 |   |   |
| **X3.2** |   | 0,909974 |   |   |
| **X3.3** |   | 0,825050 |   |   |
| **Y1.1** | 0,889356 |   |   |   |
| **Y1.2** | 0,816608 |   |   |   |
| **Y1.3** | 0,925683 |   |   |   |

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa untuk konstruk Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, nilai loading tertinggi terdapat pada indikator X1.2 yaitu pencatatan transaksi, sebesar 0,853708, kemudian X1.4 yaitu pelaporan, 0,821623, X1.3 yaitu pengklasifikasian transaksi sebesar 0,783127 dan nilai loading terendah X1.1, yaitu pengidentifikasian transaksi sebesar 0,749513. Konstruk Pengendalian Internal, nilai loading tertinggi pada indikator X2.1 yaitu lingkungan pengendalian sebesar 0,865407, kemudian X2.2 yaitu penilaian risiko sebesar 0,827456, X2.4 yaitu komunikasi dan informasi sebesar 0,826207, X2.5 yaitu pemantauan sebesar 0,819402 dan terendah X2.3 yaitu kegiatan pengendalian sebesar 0,793212. Konstruk Komitmen Organisasi nilai loading tertinggi pada indikator X3.2 yaitu keterlibatan sebesar 0,909974, kemudian X3.3 yaitu identifikasi dan terendah indikator X3.1 yaitu loyalitas sebesar 0,825050, Konstruk Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah nilai loading tertinggi pada indikator Y1.3 sebesar 0,925683, kemudian Y1.2 yaitu pengungkapan sebesar 0,889356, dan nilai loading terendah indikator Y1.2 yaitu integritas hanya 0,816608. Dari semua indikator tersebut diatas nilai loading yang didapat >0,7, hal ini membuktikan bahwa semua indikator valid sebagai pengukur konstruknya.

1. Composite Reliability

Nilai *composite reliability* yang tinggi menunjukkan adanya konsistensi yang baik dari setiap indikator dalam variabel laten untuk mengukur variabel tersebut. Kriteria nilai *composite reliability* >0,7 menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki internal konsistensi yang baik. Nilai *composite realibility* selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.3** **Nilai *Composite Reliability***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Composite Reliability** |
| **Akuntabilitas Finansial (Y)** | 0,909957 |
| **Komit. Organisasi (X3)** | 0,904091 |
| **Pengendalian Internal (X2)** | 0,915130 |
| **Sis. Akt.Keu.Daerah (X1)** | 0,878668 |

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah sebesar 0,909957, Komitmen Organisasi sebesar 0,904091, Pengendalian Internal sebesar 0,915130 dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,878668. Ke-empat konstruk tersebut nilai composite reliability >0,70 maka dikatakan memiliki internal konsistensi yang baik.

1. *Average Variance Extracted* (AVE)

Nilai AVE menunjukkan nilai varians pada masing-masing indikator dalam konstruk yang dapat ditangkap oleh variabel tersebut lebih banyak dibandingkan dengan varians yang diakibatkan oleh kesalahan pengukuran. Nilai AVE diharapkan > 0,5. Nilai AVE konstruk Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah sebesar 0,771564, Komitmen Organisasi sebesar 0,758877, Pengendalian Internal sebesar 0,683367 dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,644735. Hasil selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.4**  **Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **AVE** |
| **Akuntabilitas Finansial (Y)** | 0,771564 |
| **Komit. Organisasi (X3)** | 0,758877 |
| **Pengendalian Internal (X2)** | 0,683367 |
| **Sis. Akt.Keu.Daerah (X1)** | 0,644735 |

1. Cronbach’s Alpha

Uji reliabilitas diperkuat dengan nilai alpha cronbach’s*.* Batasan uji reliabilitas *alpha cronbach’s* > 0,7. Nilai *alpha cronbach’s* yang didapat konstruk Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah sebesar 0,851958, Komitmen Organisasi sebesar 0,840672, Pengendalian Internal sebesar 0,884478 dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,816232. Hasil nilai *Cronbach’s alpha* selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.5 Nilai *Cronbach’s Alpha***

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cronbachs Alpha** |
| **Akuntabilitas Finansial (Y)** | 0,851958 |
| **Komit. Organisasi (X3)** | 0,840672 |
| **Pengendalian Internal (X2)** | 0,884478 |
| **Sis. Akt.Keu.Daerah (X1)** | 0,816232 |

1. Uji Model Structural (Inner Model)

Untuk menguji model struktural dilakukan dengan melihat nilai R2 yang merupakan uji *Goodness of the fit*. Konstrak kinerja memperoleh nilai R2 sebesar 0,691675 yang dapat diinterpretasikan bahwa varian pada akuntabilitas finansial pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk system akuntansi keuangan daerah, pengendalian internal dan komitmen organisasi sebesar 69.17% sedangkan sisanya 30,83% (100% - 69.17%) dijelaskan oleh variabel lain diluar yang diteliti. Hasil nilai R-square selengkapnya disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.6**  **Nilai R-Square**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **R Square** |
| **Akuntabilitas Finansial (Y)** | 0,691675 |
| **Komit. Organisasi (X3)** |   |
| **Pengendalian Internal (X2)** |   |
| **Sis. Akt.Keu.Daerah (X1)** |   |

Untuk menguji nilai *Q-Square predictive relevance* yang bertujuan mengukur seberapa baik model struktural. Perhitungan nilai Q2 perhitungan sebagai berikut :

*Q2* = 1 – (1-0,691675) = 0,691675

Dari hasil perhitungan di atas nilai Q2 sebesar 0,691675 lebih besar dari 0 dan mendekati nilai 1 sehingga dikatakan bahwa model struktural dapat dikatakan baik.

Uji selanjutnya adalah untuk melihat signifikansi pengaruh antar konstrak independen terhadap dependen dan menjawab apa yang telah dihipotesiskan. Pengujian dengan taraf signifikansi 5% jika nilai t-statistic > 1.96 maka hipotesis diterima. Nilai t-statistik koefisien pengaruh dari konstruk laten diperoleh dari *PLS* *Bootstrapping*. Hasil Model *PLS* *Bootstrapping* disajikan pada gambar berikut ini:



**Gambar 4.2.** Model Boostraping

Nilai koefisien parameter dapat dilihat pada nilai (*original sample)* dan nilai signifikansi t-statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 5.7** **Nilai Koefisien (Original Sample), *Standard Error* dan *T-Statistics***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Original Sample (O)** | **Sample Mean (M)** | **Standard Deviation (STDEV)** | **Standard Error (STERR)** | **T Statistics (|O/STERR|)** |
| **Komit. Organisasi (X3) -> Akuntabilitas Finansial (Y)** | 0,514279 | 0,512050 | 0,090787 | 0,090787 | 5,664675 |
| **Pengendalian Internal (X2) -> Akuntabilitas Finansial (Y)** | 0,169051 | 0,177338 | 0,095480 | 0,095480 | 1,770544 |
| **Sis. Akt.Keu.Daerah (X1) -> Akuntabilitas Finansial (Y)** | 0,283723 | 0,280927 | 0,081980 | 0,081980 | 3,460872 |

1. Hipotesis 1

Nilai koefisien pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah sebesar 0,283723, nilai standard error 0,090787 dan nilai t-statistik 5,664675. Karena nilai t-statistik 5,664675 > 1,96 maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

1. Hipotesis 2

Nilai koefisien pengaruh Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah sebesar 0,169051, standard error 0,095480 dan nilai t-statistik 1,770544. Karena nilai t-statistik 1.770544 < 1.96 maka hipotesis ditolak. Hal ini membuktikan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

1. Hipotesis 3

Nilai koefisien pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah sebesar 0,514279, standard error 0,090787 dan nilai t-statistik 5,664675. Karena nilai t-statistik 5,664675 > 1.96 maka hipotesis diterima. Hal ini membuktikan bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.

**3. Pembahasan**

Dengan mengacu pada hasil uji analisis yang telah diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel independen yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1), Pengendalian Internal (X2), Komitmen Organisasi (X3) terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah (Y).

Pembahasan dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian,tujuan penelitian ini menganalisis Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern serta Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Finansial Pemerintah Daerah, studi dilakukan pada SKPD Kabupaten Berau. Penelitian ini berdimensi pada Akuntabilitas Keuangan (*financial accountability*). Hopwood dan Tomkins (1984) dalam Mahmudi (2005), menguraikan dimensi-dimensi akuntabilitas di sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*Accountability for probity and legality*);
2. Akuntabilitas manajerial (*Manajerial accountability*);
3. Akuntabilitas program (*Program accountability*);
4. Akuntabilitas kebijakan (*Policy accountability*);
5. Akuntabilitas keuangan (*Financial accountability*).

**1. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Finansial**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui *t-statistic* sebesar 3,46 yang lebih besar dari 1,96 hal ini berarti sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas finansial pada SKPD Kabupaten Berau, hal ini menunjukan sistem dan prosedur keuangan pada SKPD pemerintah Kabupaten Berau telah dilaksanakan sesuai peraturan yang ada sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, telah melaksanakan prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Semakin baik penerapan sistem akuntansi keuangan daerah maka akuntabilitas laporan keuangan dapat lebih dipertanggungjawabkan pula.

Indikator pencatatan transaksi memberikan kontribusi yang terbesar pada sistem akuntansi keuangan daerah, hasil penelitian menunjukan setiap transaksi keuangan telah didukung oleh bukti bukti transaksi, sistem pencatatan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan kronologisnya sehingga pelaporan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif, berarti penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada SKPD Kabupaten Berau,

Sistem akuntansi pemerintah daerah dalam Permendagri No. 13 tahun 2006 dinyatakan:

1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah.
2. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.
3. Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fika (2016) pada dua belas dinas pemerintah Kabupaten Bandung Barat, diketahui penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan sebesar 58,2 persen. Penelitian ini sesuai pula dengan hasil penelitian Hidayat (2015) pada satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Padang Pariaman menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat memberikan dukungan terhadap kinerja pemerintah daerah yang dicapai. Selain itu beberapa penelitian yang menemukan hasil yang sama bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan daerah adalah Sujono dan Firdaus (2017); Faizun(2017); Pasya (2016); Anggaraini dkk (2016); Anandita (2015); Soleha (2014); dan Kurnia (2013).

**2. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Finansial**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui *t-statistic* sebesar 1,771 yang lebih kecil dari 1,96 hal ini berarti pengendalian internberpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas financial, berarti pengendalian intern yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 belum dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada SKPD Kabupaten Berau karena belum dilaksanakan secara efektif dan efisien. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, Pasal 3:

1. SPIP terdiri atas unsur:
2. lingkungan pengendalian
3. penilaian risiko
4. kegiatan pengendalian
5. informasi dan komunikasi
6. pemantauan pengendalian intern.
7. Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah.

SPI merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Jika sitem pengendalian efektif maka kegiatan operasional juga dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Tujuan sistem pengendalian intern pemerintah adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara
2. Keandalan pelaporan keuangan
3. Pengamanan aset Negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Santoso (2016) di Pemkab Lampung Timur yang menyatakan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, hal ini menunjukkan terdapat pengaruh yang positif pada sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Namun demikian, dengan meningkatnya sistem pengendalian intern pemerintah belum tentu akan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Ada faktor-faktor lain selain sistem pengendalian intern pemerintah yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan daerah.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Soleha (2014) pada SKPB Kabupaten/Kota Propinsi Banten yang menunjukkan implementasi aktivitas pengendalian memberikan pengaruh yang positif dan signifikan atas akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih dkk (2011),Sari dkk (2017), Santoso (2016) dan Ramon (2014).

**3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Akuntabilitas Finansial**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui *t-statistic* sebesar 5,66 yang lebih besar dari 1,96 hal ini berarti komitmen organisasiberpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas finansial pada SKPD kabupaten Berau. Berarti semakin tinggi komitmen organisasi maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan. Komitmen organisasimerupakan suatu keadaan dimana karyawan memihak dan peduli kepada organisasi dan tujuan organisasi serta suatu kondisi dimana loyalitas karyawan dibuktikan dengan berusaha tetap bertahan bersama organisasi yang ditempatinya.

Adapun indikator komitmen organisasi yang digunakan dalam penelitian pada SKPD kabupaten Berau yaitu:

1. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
2. Keterlibatan (*Involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan merupakan indikator nilai tertinggi yang mendukung peningkatan akuntabilitas.
3. Loyalitas (*loyality*)*,* yaitu perasaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal. Artinya semakin baik pemahaman dan penghayatan terhadap tujuan organisasi dan perasaan dilibatkan dalam pekerjaan yang menyenangkan maka loyalitas pegawai semakin tinggi sehingga memberikan motivasi untuk bekerja lebih baik, mendorong peningkatan kinerja pegawai sebagai pengelola keuangan pemerintah daerah dan dapat meningkatkan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan,

Pengaruh antara komitmen organisasi terhadap akuntabilitas publik menurut Robbins (1996) bahwa komitmen karyawan pada organisasi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan perasaan suka atau tidak suka seorang karyawan terhadap organisasi tempat dia bekerja. Komitmen organisasi menunjukkan pertanggungjawaban dari seseorang dalam mengidentifikasi keterlibatannya dalam suatu organisasi, dengan adanya rasa ikut memiliki, maka timbul suatu tanggungjawab untuk menjalankan kewajibannya dengan baik pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi dapat mempengaruhi akuntabilitas publik.

 Komitmen organisasi akan tercipta jika adanya tanggung jawab yang besar dari personil organisasi terhadap pekerjaan yang diberikan padanya, Oleh karena itu komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi (Abdullah, 2005). Luthans (1998) menyebutkan jika seorang individu memiliki komitmen organisasi yang tinggi, maka pencapaian tujuan organisasi menjadi hal penting bagi organisasi tersebut, sebaliknya individu dengan komitmen organisasi yang rendah akan memiliki perhatian yang rendah pula dan cenderung untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komitmen yang tinggi dalam diri individu maka semakin tinggi kepeduliannya terhadap organisasi sehingga individu tersebut akan terus berusaha untuk menjadikan organisasinya kearah yang lebih baik, hasil penelitian ini mendukung penelitian oleh Zeyn (2011) dan Ridwan dkk (2012).

**6. Simpulan, dan Saran**

**6.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas finansial pada SKPD Kabupaten Berau, berarti sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan pada SKPD pemerintah Kabupaten Berau telah dilaksanakan sesuai peraturan dan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah, berarti pengendalian intern yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 belum dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pada SKPD Kabupaten Berau karena masih terdapat kelemahan dalam penerapannya sehingga belum berfungsi efektif.
3. Komitmen organisasiberpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas finansial pada SKPD Kabupaten Berau, berarti semakin tinggi komitmen organisasi maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan. Komitmen organisasimerupakan suatu keadaan dimana pegawai memihak dan peduli kepada organisasi dan tujuan organisasi serta suatu kondisi dimana loyalitas pegawai dibuktikan dengan berusaha tetap bertahan bersama organisasi yang ditempatinya, sehingga dapat memotivasi penyusunan laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas keuangan.

**6.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik pula saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada setiap SKPD untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dalam bidang akuntansi dan pengelola keuangan negara, merekrut tenaga-tenaga akuntan, mengikuti berbagai pelatihan kedinasan mengenai administrasi keuangan negara. Dan meningkatkan komitmen organisasi.
2. Meningkatkan pengendalian intern karena memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas finansial melaui peningkatan peran auditor intern yakni berfokus pada fungsi pengendalian sebagai bagian dari fungsi manajemen pemerintahan dengan melakukan pembinaan terhadap SKPD, evaluasi secara periodik melalui pemantauan berkelanjutan, meningkatkan peran sistem informasi manajemen, serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya sehingga dapat lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

**Daftar Pustaka**

Abdullah. 2005. Pengaruh Komitmen terhadap Kepuasan Kerja Auditor: Motivasi sebagai variabel intervening (Studi Empiris pada Kantor BPK Yogyakarta), UGM, Yogyakarta.

Albugis, Febriana F. 2016. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal EMBA: *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi.* Vol. 4, No.3

Allen J, Natalie & Meyer, John P. 1990, The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Comitment to The Organization. Journal of Occupational Psychology. Vol 63

Anandita, Dita Tria. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Bandung). *Skripsi*. Universitas Widyatama

Andarini, Jayatri. 2015. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Skripsi. Universitas Airlangga

Anggraini, Dewi Yuli, Restu Agusti dan Lila Anggraini. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir). *JOM Fekon*, Vol.3 No.1 (Februari).

Baihaqi. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peran Manajerial Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Jurnal Fairness.* Vol 1 No 3 243-253.

Bastari, Iman. 2004. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud reformasi manajemen keuangan daerah. Anggota Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan. http://www.ksap.org/Riset&Artikel/Art5.pdf

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik.* Jakarta. Penerbit Erlangga.

BPK. 2015. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) Semester II Tahun 2015.

Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik). Cetakan I. Jakarta. PT Indeks.

Dewi, Luh Kartika Utami , Gede Adi Yuniarta, dan Made Aristia Prayudi. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap keberhasilan Penerapan SAP Berbasis Akrual (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Badung.) *e-jurnal*. Vol: 8 No: 2 Tahun 2017. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Faizun. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelaporan keuangan serta Implikasinya pada Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Sabang, Banda Aceh. Tesis. Fakultas Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala.

Halim,Rahmawati. 2012*.*Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan. Jurnal Academica Fisip Untad Vol.04 No. 01 Pebruari 2012

Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta . Salemba Empat.

 . 2013. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah,* Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Halim, Rahmawati. 2012. Pengaruh Komitmen Organisasi dan Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Banggai Kepulauan.*JURNAL ACADEMICA* Fisip Untad VOL.04 No. 01.

Hidayat, Rahmat. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). Artikel lmiah. Universitas Airlangga.

Indrayani, Luh Febri, Putu Gede Diatmika, Made Arie Wahyuni. 2017. Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar). *e-jurnal*. Vol: 8 No: 2 Tahun 2017. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.

Kurnia, Indra. 2013. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang.

Kurniawan, Muhammad Rizki Nur dan Andri Prastiwi. 2013. Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Organisasi Publik (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak). Artikel Ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

LKPJ Bupati Kabupaten Berau. 2014.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Pemerintah Kabupaten Berau. 2016.

Listiyana, Fifien Dhesta. 2015. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kedisiplinan, Budaya Organisasi, Motivasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wonogiri). *Skripsi.* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lubis, Arfan Ikhsan. 2010, Akuntansi Keperilakuan. Jakarta. Salemba Empat.

Madison, Kristen Joie. 2014. Agency Theory and Stewardship Theory Integrated, Expanded, and Bounded by Context: An Empirical Investigation of Structure, Behavior, and Performance within Family Firms. *Dissertations*.American : University of Tennessee

Mahmudi. 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta. Penerbit Erlangga.

 . 2013, Manajemen Kinerja Sektor Publik. , Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.

. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Meliani, Fika. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Akuntabilitas Keuangan (Survey Pada 12 Dinas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Skripsi.* Universitas Widyatama Bandung.

Mulyadi. 2010, Sistem Akuntansi. Jakarta. Salemba Empat.

Oesi, Agustina. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Malang (Tahun Anggaran 2007-2011). http:/jimfeb.ub.ac.id. Diakses 25 Oktober 2015 Hal. 15.

Pasya, Rezky Aliman. 2016. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi pada Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung). *Skripsi.* Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan Bandung

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 *tentang Pengendalian Intern Pemerintah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.* 2010, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Ramon, Dolly. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Vol.2, No.2.*

Robbins, Stephen P. dan Timothy A. Judge. 2007. Perilaku Organisasi. Jakarta. Salemba Empat.

Santoso, Eli Budi. 2016. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur). *Tesis*. Program Pascasarjana Ilmu Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.

Sari, Embun Widya, Nur Azlina dan Julita. 2017. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu. *JOM Fekon.* Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017.

Soleha, Nurhayati. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan: Studi pada SKPD Kabupaten/Kota Propinsi Banten. *Etikonomi Jurnal Ekonomi.* Vol. 13 No. 1 April 2014.

Surjono, Welly, dan Nova Roslina Firdaus. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan pada Satuan Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 5 (1), 1357-1368.*

Triantoro [Arvian, 2014. Pengaruh kompetensi Pegawai dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD di Kota Bandung](https://www.researchgate.net/publication/298398795_PENGARUH_KOMPETENSI_PEGAWAI_DAN_KOMITMEN_ORGANISASI_TERHADAP_KUALITAS_LAPORAN_KEUANGAN_SATUAN_KERJA_PERANGKAT_DAERAH_SKPD_DI_KOTA_BANDUNG) , Universitas Pendidikan Indonesia.

Tim Pokja Evaluasi Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah. 2000, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Buku I.

 Tuasikal, Askam. 2009. Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi keuangan dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah. *Jurnal ISSN:1410-8623*. Maluku: Universitas Pattimura.

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *tentang Pemerintah Daerah.*

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara.*

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Widyaningsih, Tristanti, Alvian Triantoro, Lili Sugeng Wiyantoro. 2011. Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening (Penelitian pada Laporan Realisasi Anggaran di Pemda Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi Jawa Barat), *Prosiding SNA XIV.* Aceh

Winanti, Sri. 2014. Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelatihan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Ratu Samban.

 Zeyn, Elvira. 2011. Pengaruh Good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi, E-journal Universitas Muhammadiyah Malang, 7(22), h: 124-136.

<http://www.bpkp.go.id/konten/419/Akuntabilitas-Pelaporan-Keuangan.bpkp>

http://www.beraukab.go.id

**Appendiks**

**Kuesioner Penelitian**

1. **Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Daftar pernyataan berikut terdiri dari tipe isian dan tipe pilihan. Pada tipe isian, mohon kesediaan Bapak/Ibu mengisi jawaban sesuai dengan petunjuk sebagai berikut:

1. Berilah tanda silang (X) pada kolom yang tersedia dan pilih jawaban yang menurut anda paling sesuai.
2. Anda hanya diperkenankan memberi tanda pada satu kolom pada setiap pertanyaan.
3. Jawaban hendaknya diisi atas dasar pengalaman dan pendapat anda tanpa adanya pengaruh maupun dari pihak atau dari orang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan analisis data.
4. Kerahasiaan identitas responden menjadi tanggungjawab peneliti. Bapak/Ibu jika keberatan boleh merahasiakan identitas (tidak mengisi isian identitas).
5. **Demografi Responden**
6. Nama : .....................................................................(Boleh tidak diisi)
7. Usia : ................................ Tahun
8. Jenis Kelamin : Pria Wanita
9. Kedudukan Jabatan : ........................................................................
10. Status pegawai : PNS Non PNS
11. Berapa lama anda bekerja dibidang ini?................... Tahun
12. Tingkat Pendidikan :

 SMU

 Diploma (sebutkan : D1 D2 D3)

 S1

 S2

 Lain-lain, sebutkan....................

1. Status: Kawin Belum Kawin
2. Pelatihan yang berkaitan dengan Sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan yang pernah diikuti.............................................................................................

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Berilah nilai untuk setiap pernyataan tentang pendapat Bapak/Ibu terhadap sistem akuntansi keuangan daerah, pengendalian intern, komitmen organisasi dan akuntabilitas finansial/keuangan yang lebih sesuai menurut Bapak/Ibu, dengan memberi tanda (X) pada kolom sesuai keterangan sebagai berikut:

**Kriteria penilaian:**

1. **SS = Sangat Setuju**
2. **S = Setuju**
3. **CS = Cukup Setuju**
4. **TS = Tidak Setuju**
5. **STS = Sangat Tidak Setuju**
6. **Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERNYATAAN** | **JAWABAN** |
| **SS** | **S** | **CS** | **TS** | **STS** |
| **(5)** | **(4)** | **(3)** | **(2)** | **(1)** |
| **Pengidentifikasian transaksi** |  |  |  |  |  |
| 1. | Menurut saya setiap transaksi keuangan pada instansi ini dilakukan dengan analisis transaksi/identifikasi transaksi. |  |  |  |  |  |
| 2. | Menurut saya pada instansi ini dilaksanakan pengidentifikasian terhadap pencatatan. |  |  |  |  |  |
| **Pencatatan transaksi** |  |  |  |  |  |
| 3. | Menurut saya setiap transaksi keuangan pada instansi ini didukung oleh bukti transaksi. |  |  |  |  |  |
| 4. | Menurut saya sistem pencatatan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. |  |  |  |  |  |
| 5. | Menurut saya pada instansi ini semua transaksi keuangan dilakukan pencatatan secara kronologis. |  |  |  |  |  |
| 6. | Menurut saya pencatatan telah dilakukan secara efektif. |  |  |  |  |  |
| 7. | Menurut saya pencatatan keuangan yang dilakukan menimbulkan dampak yang baik bagi instansi. |  |  |  |  |  |
| **Pengklasifikasian transaksi** |  |  |  |  |  |
| 8. | Menurut saya pada instansi ini dilakukan pengklasifikasian terhadap transaksi yang terjadi. |  |  |  |  |  |
| 9. | Menurut saya pada instansi ini dilakukan klasifikasi atas transaksi sesuai dengan pos-pos yang semestinya. |  |  |  |  |  |
| 10. | Menurut saya jurnal dan posting yang dilakukan sesuai dengan nomor yang telah ditetapkan pemerintah. |  |  |  |  |  |
| **Pelaporan** |  |  |  |  |  |
| 11. | Menurut saya pelaporan laporan keuangan dilakukan secara konsisten dan periodic. |  |  |  |  |  |
| 12. | Menurut saya pembuatan laporan keuangan dilakukan setiap periode akuntansi. |  |  |  |  |  |
| 13. | Menurut saya pelaporan yang dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Pengendalian Intern (X2)**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERNYATAAN** | **JAWABAN** |
| **SS** | **S** | **CS** | **TS** | **STS** |
| **(5)** | **(4)** | **(3)** | **(2)** | **(1)** |
| **Lingkungan Pengendalian** |  |  |  |  |  |
| 1. | Pimpinan sudah menetapkan kode etik/aturan perilaku ASN |  |  |  |  |  |
| 2. | Instansi telah membentuk Satgas SPIP sesuai ketentuan |  |  |  |  |  |
| 3. | Pimpinan instansi telah mendelegasikan tugasnya secara teknis kepada pegawai secara berjenjang sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangannya |  |  |  |  |  |
| 4. | Pimpinan telah mendelegasikan anggaran untuk pengembangan SDM |  |  |  |  |  |
| **Penilaian Resiko** |  |  |  |  |  |
| 5. | Pimpinan dan pegawai SKPD yang berkepentingan diikutsertakan dalam kegiatan analisis risiko |  |  |  |  |  |
| 6. | Identifkasi risiko merupakan hasil dari pertimbangan atas temuan audit, hasil evaluasi dan penilaian lainnya |  |  |  |  |  |
| 7. | Identifikasi risiko sudah mencantumkan risiko kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan Instansi |  |  |  |  |  |
| 8. | Telah dibuat daftar urutan prioritas risiko dan level risiko kegiatan prioritas yang sudah ditentukan dengan benar |  |  |  |  |  |
| **Kegiatan Pengendalian** |  |  |  |  |  |
| 10. | Pimpinan SKPD secara berkala mereviu kinerja. Inisiatif signifikan dari SKPD dipantau pencapaian targetnya dan tindak lanjut yang akan diambil |  |  |  |  |  |
| 11. | Ada pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD. |  |  |  |  |  |
| 12. | SKPD tempat saya bekerja telah memiliki prosedur untuk memastikan bahwa pegawai dengan kompetensi yang tepat yang direkrut dan dipertahankan. |  |  |  |  |  |
| 13. | Pimpinan SKPD telah melakukan *Stok Opname* terhadap Uang Tunai dan Barang yang dikelolanya. |  |  |  |  |  |
| 14. | SKPD memiliki pegawai berbeda yang terkait dengan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau pemerimaan dana, serta fungsi-fungsi penyimpanan dan penanganan aset dengan SK pimpinan. |  |  |  |  |  |
| **Komunikasi dan Informasi** |  |  |  |  |  |
| 15. | Instansi sering melakukan rapat staf secara berkala. |  |  |  |  |  |
| 16. | Rapat pengendalian minimal 1 kali tiap bulan, harus dilakukan. |  |  |  |  |  |
| 17. | Rencana Tindak Pengendalian telah disosialisasikan kepada semua pegawai. |  |  |  |  |  |
| 18. | Adanya kegiatan pengendalian risiko yang dirancang telah menggunakan sarana Informasi yang tepat. |  |  |  |  |  |
| **Pemantauan** |  |  |  |  |  |
| 19. | Adanya kegiatan evaluasi SOP di SKPD secara berkala. |  |  |  |  |  |
| 20. | Pemantauan proses kegiatan sehari-hari terus dilakukan. |  |  |  |  |  |
| 21. | Temuan BPK harus dievaluasi, ditanggapi, dan ditindaklanjuti dengan tepat waktu. |  |  |  |  |  |
| 22. | Adanya prosedur yang diterapkan dalam menindaklanjuti temuan BPK. |  |  |  |  |  |

**C.Komitmen Organisasi (X3)**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERNYATAAN** | **JAWABAN** |
| **SS** | **S** | **CS** | **TS** | **STS** |
| **(5)** | **(4)** | **(3)** | **(2)** | **(1)** |
| **Identifikasi** |  |  |  |  |  |
| 1. | Saya memahami dan meyakini tujuan organisasi.. |  |  |  |  |  |
| 2. | Saya menerima norma-norma yang berlaku |  |  |  |  |  |
| 3. | Saya mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. |  |  |  |  |  |
| 4. | Saya menghayati diri sebagai bagian dari organisasi. |  |  |  |  |  |
| **Keterlibatan** |  |  |  |  |  |
| 5. | Saya bekerja dengan baik di dalam organisasi. |  |  |  |  |  |
| 6. | Saya mengerjakan tugas yang diberikan. |  |  |  |  |  |
| 7. | Saya memberikan usaha yang terbaik bagi organisasi. |  |  |  |  |  |
| 8. | Saya menempatkan prioritas organisasi diatas kepentingan pribadi. |  |  |  |  |  |
| 9. | Saya menerima tanggungjawab lebih dari yang seharusnya diemban.. |  |  |  |  |  |
| **Loyalitas** |  |  |  |  |  |
| 10. | Saya menganggap bahwa organisasi ini sebagai tempat yang sesuai dan nyaman untuk bekerja |  |  |  |  |  |
| 11. | Saya menghayati bahwa organisasi ini merupakan tempat bekerja yang terbaik. |  |  |  |  |  |
| 12. | Saya bangga sebagai bagian dari organisasi. |  |  |  |  |  |

1. **Akuntabilitas Finansial (Y)**

|  |  |
| --- | --- |
| **PERNYATAAN** | **JAWABAN** |
| **SS** | **S** | **CS** | **TS** | **STS** |
| **(5)** | **(4)** | **(3)** | **(2)** | **(1)** |
| **Pengungkapan** |  |  |  |  |  |
| 1. | Menurut saya laporan keuangan mencakup semua transaksi yang terjadi pada instansi pemerintah. |  |  |  |  |  |
| 2. | Menurut saya laporan keuangan instansi harus bisa diperbandingkan.  |  |  |  |  |  |
| 3. | Menurut saya laporan keuangan instansi bebas dari kesalahan material. |  |  |  |  |  |
| 4. | Menurut saya pembuatan laporan keuangan tahunan sudah dilakukan secara bertahap dan memperhatikan urutan persiapan dan ruang lingkup laporan yang berbasis akrual. |  |  |  |  |  |
| **Integitas** |  |  |  |  |  |
| 5. | Menurut saya biaya yang dikeluarkan dengan penggunaan input harus sesuai. |  |  |  |  |  |
| 6. | Menurut saya informasi keuangan yang dihasilkan dari laporan keuangan sebagai alat evaluasi dan koreksi atas kegiatan dimasa lalu untuk penyusunan anggaran tahun berikutnya. |  |  |  |  |  |
| 7. | Menurut saya Menyajikan setiap informasi dalam laporan keuangan yang ditujukan untuk kebutuhan umum dan tidak berpihak pada pihak-pihak tertentu. |  |  |  |  |  |
| 8. | Melalui laporan keuangan pemerintah telah melaporkan pendapatan dan belanja tepat waktu. |  |  |  |  |  |
| **Ketaatan pada Peraturan** |  |  |  |  |  |
| 7. | Menurut saya laporan keuangan tahunan yang saya sajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. |  |  |  |  |  |
| 8. | Menurut saya seluruh elemen dalam instansi telah memenuhi syarat kejujuran dan integritas dalam bekerja. |  |  |  |  |  |
| 9. | Laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun di*reviwe* oleh Inspektorat.  |  |  |  |  |  |
| 10. | Laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPK. |  |  |  |  |  |
| 11. | Menindaklanjuti laporan penilaian atas pertanggungjawaban keuangan berdasarkan temuan BPK. |  |  |  |  |  |